

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis.. Renstra OPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja serta pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk Periode 5 (lima) tahun

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Landasan Hukum.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 5. Undang –Undang No 18 tahun 2012 Tentang Pangan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4663)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4741)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4815)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698).
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun Daerah.

11. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga

C. Maksud dan Tujuan .

Maksud

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah pembangunan Ketahanan pangan dan Perikanan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021

2. Memberikan Pedoman dalam menyusun Rencana kerja (RENJA) tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun.

Tujuan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan :

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga terpilih periode 2016-2021
2. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dasar dalam pengendalian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (Lima) tahun
3. Menjadi Landasan / pedoman dalam penyusunan renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (Tujuh) bab. Secara garis besar ,tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan .

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Organisasi Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .

BAB III Isu –Isu strategis berdasarkan tugas dan Fungsi

Bab ini terdiri dari uraian tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan visi dan misi jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016-2021. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran ,strategi dan kebijakan pembangunan

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup.

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan, dilakukan dengan (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan (b) meningkatkan motivasi masyarakat (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan dan (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (DKPP) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

Pemerintahan bidang Pangan dan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah .

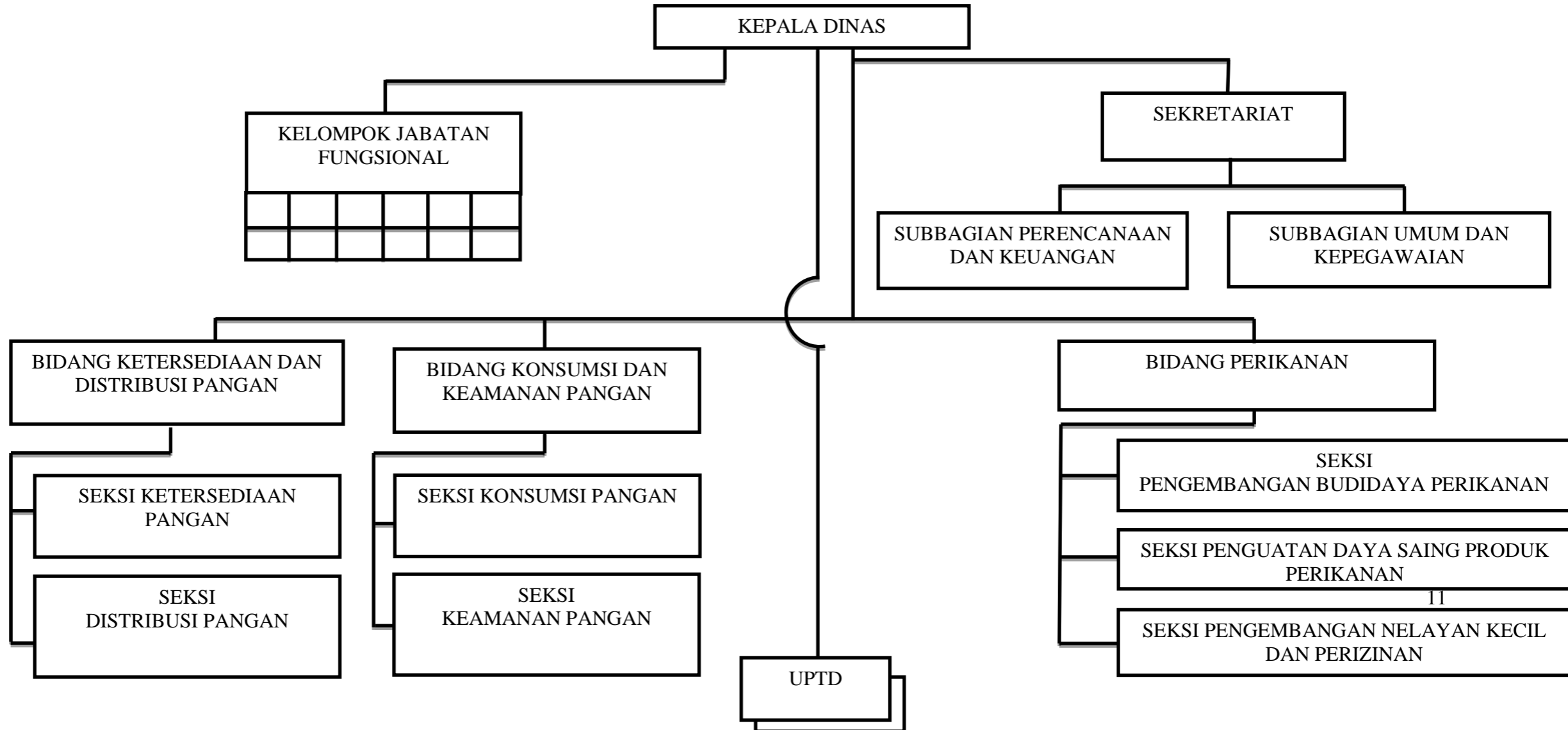
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud DKPP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi ,Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, Konsumsi dan Ketersediaan pangan serta Perikanan.
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 3 (tiga) unit eselon III yang dibantu oleh 11 (sebelas) eselon IV sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.:

BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA



1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat DKPP mempunyai Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DKPP
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DKPP
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DKPP.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan DKPP.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pengordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian (Subbag) yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program dan anggaran ,pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DKPP.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DKPP.

2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana ketersediaan dan distribusi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Dalam melaksanakan Tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

2. Pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan.
3. Penyusunan neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
4. Pengkoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN)
5. Penyusunan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
6. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan
7. Penanganan kerawanan pangan dan intervensi daerah rawan pangan
8. Penyusunan analisis distribusi pangan, pasokan dan harga pangan
9. Identifikasi dan Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
10. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
11. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat
12. Penyusunan analisis cadangan pangan
13. Penanganan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten
14. Pengembangan cadangan pangan masyarakat
15. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1. **Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan, pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan

(PPH) ketersediaan pangan, pengoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), penyusunan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan intervensi daerah rawan pangan

2. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen, data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, penyusunan analisis cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten, pengembangan cadangan pangan masyarakat.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan adalah unsur pelaksana Konsumsi dan Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal,
2. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penganekaragaman pangan,
3. Pengembangan pangan lokal,

4. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga,
5. Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
6. Pelaksanaan analisis bidang Konsumsi Pangan
7. Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan
8. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
9. Perhitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun
10. Kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,
11. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan,
12. Pelaksanaan jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)
13. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan,
14. Promosi konsumsi pangan organik sehat dan aman,
15. Kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan keamanan pangan,
16. Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 2(dua) seksi yaitu:

1. **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi promosi, penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), Penganeekaragaman

pangan, pengembangan pangan lokal, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu pelaksanaan analisis di bidang konsumsi pangan, penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, perhitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat alam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. **Seksi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan, pelaksanaan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan sistem keamanan pangan terpadu (SKPT) pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan pangan, pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, promosi, konsumsi pangan organik, sehat dan aman, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan keamanan pangan.

4. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan budidaya perikanan, penguatan daya saing produk perikanan serta pengembangan nelayan kecil dan perijinan.

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan pembudidaya ikan meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan standarisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB/CBIB), standarisasi mutu benih, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan, pengawasan alat pengangkut ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembudidaya ikan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses IPTEK, penyuluhan, pendampingan, pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan pelaku usaha pasca panen dan nelayan kecil,
3. Pemberdayaan Nelayan kecil yang meliputi inventaris, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pengaturan penggunaan alat penangkap ikan.
4. Penyediaan data statistik perikanan budidaya, pasca panen dan perikanan tangkap,
5. Penyusunan Profil pembudiaya ikan, pelaku usaha pasca panen dan nelayan kecil,
6. Penumbuhan minat masyarakat terhadap produk perikanan,
7. Pembinaan, penerapan standar mutu, pengawasan mutu, dan pengenalan produk perikanan pascapanen

8. Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) di bidang pembudidaya ikan,
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Perikanan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan pembudidaya ikan meliputi penyusunan rencana air dan lahan, standarisasi cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik (CPIB/CBIB), standarisasi mutu benih, pengelolaan kesehatan ikandan lingkungan, pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan, pengawasan alat pengangkut ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, inventrisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembudidaya ikan, penyediaan data statistik perikanan budidaya dan penyusunan profil pembudidaya ikan .

2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fasilitasi kemitraan usaha

3. Seksi Pengembangan Nelayan Kecil

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap,

pengaturan penggunaan alat penangkap ikan, penyediaan data statistik perikanan tangkap, penyusunan profil nelayan kecil, serta Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) di bidang Pembudidaya ikan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DKPP yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, tugas, fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Daya OPD

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 64 orang. Terdiri dari 16 pejabat eselon, yaitu : 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV, 25 orang staf dan 22 orang jabatan Fungsional Tertentu (Penyuluh Perikanan) yang berdasarkan kepangkatan dan Golongan terdiri dari :

No.	Golongan	Jumlah
1	IV C	1 orang
2.	IV B	2 orang
3.	IV A	3 orang
4.	III D	16 orang
5.	III C	11 orang
6.	III B	18 orang
7.	III A	5 orang
8.	II D	4 orang
9.	II C	2 orang
10.	IC	2 orang
	JUMLAH	64 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S 2	5
2.	S1/D4	35
3.	D3	11
4.	SLTA	10
5.	SLTP	3
	JUMLAH	64

2.Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Bangunan gedung DKPP di 2 (dua) lokasi, yaitu bangunan yang berada di Jalan AW Soemarmo, dan bangunan yang berada di UPT Budidaya Air Tawar Kecamatan Kutasari
2. Bangunan gedung di lingkungan Tempat Penjualan Ikan (TPI) 1 (satu) gedung kantor, 6 (enam) buah kios, 69 (enam puluh sembilan) unit lapak ikan, 32 (tiga puluh dua) unit kolam, 1 (satu) unit musola, 1 (satu) unit show room, 1(satu) unit hatchery dan 1 (satu) buah depo ikan hias .
3. Bangunan di komplek UPTD Budidaya Air Tawar (UPTD BIAT) Kutasari ada 8 (delapan) unit, hatchery 2 (dua) unit, gudang2 (dua) unit, 1(satu) mushola, 1 (satu) Pos Satpam, 1 (satu) unit Cafe Iwak, 50 (lima puluh) kolam 89 (delapan puluh sembilan) petak
4. Mesin komputer 18 (delapan belas) buah, 7 (tujuh) unit laptop dan printer 26 (dua puluh enam) unit.
5. Jaringan mesin telpon/fak 2(dua) unit, dengan rincian mesin Fak (0281) 891198 dan mesin Telpon No.(0281) 891366.
6. Televisi 6 (enam) Unit
7. AC Split sebanyak 15 (Lima belas) unit
8. LCD Proyektor 3 (tiga) unit
9. Speaker aktif 3 (Tiga) unit
10. Dispenser 2 (dua) unit
11. Kulkas 3 (Tiga) buah dan Freezer 2 (dua) buah
12. Kamera Digital 5 (lima) buah dan Hanycam 3 (Tiga) buah
13. Mobil 8 (delapan) Unit, sepeda motor roda dua 61 (enam puluh satu) unit dan sepeda motor roda tiga 1(satu) unit.

C.-Kinerja Pelayanan OPD

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

3.1 Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

Kinerja bidang Ketahanan pangan mencakup 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan cadangan pangan

Penguatan ketersediaan dan cadangan pangan Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebesar 7.500 kg beras senilai Rp 68.750.000,- yang disimpan dalam gudang cadangan pangan Kabupaten Purbalingga. Tahun 2016 disalurkan kepada warga yang kurang mampu sebanyak 2.500 kg beras, sehingga sampai akhir 2016 cadangan beras Pemerintah Kabupaten ditambah dengan penyusutan tinggal 4.609,8 kg. Ketersediaan pangan pokok beras dari hasil panen tahun 2015 terdapat surplus beras sekitar 63 ribu ton yang menurun pada akhir tahun 2016 hanya mencapai surplus sekitar 56 ribu ton akibat gangguan musim. Dengan demikian ketersediaan pangan untuk Kabupaten Purbalingga tercukupi.

2. Distribusi dan akses pangan

Dari Pemerintah Pusat tahun 2015 dan 2016 menyalurkan beras untuk keluarga tidak mampu kepada Rumah Tangga Sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) 80,337 KK sebanyak 14.000 ton, dengan penerimaan beras untuk setiap keluarga adalah 15 kg/kk/bulan.

Distribusi cadangan pangan bagi keluarga miskin di samping mendapat jatah dari Pemerintah berupa beras miskin, juga mendapat bagian dari cadangan pangan kabupaten, terutama dalam mengatasi bencana alam dan rawan pangan.

3. Penganekaragaman dan keamanan pangan

Dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan, maka dilaksanakan kegiatan pengolahan pangan potensi lokal antara lain pengolahan komoditas singkong, labu, manggis yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan kelompok wanita tani di sejumlah desa dengan peserta yang mengikuti masing-masing 25 orang. Program pengolahan pangan lokal ini dimaksudkan untuk mempercepat penganekaragaman pangan bagi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asyarakat. Di samping itu juga dilaksanakan program pemberian makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai program yang menysasar kepada anak-anak SD yakni dengan memberikan bantuan pangan yang terdiri dari nasi, sayur, lauk-pauk, air, buah dan susu yang diberikan selama 10 hari.

Tabel. Pemberian Makanan B2SA Bagi Siswa SD/MI

Tahun	Lokasi	Jumlah Siswa	Sumber Dana
2015	SD Negeri 1 Jingkang, Kec. Karangjambu	100	APBD I
2016	SD Negeri 3 Kedungbenda Kec. Kemangkon	100	APBD II
2016	SD Negeri 3 Pasunggingan Kec. Pengadegan	100	APBD I

Di samping itu juga dilakukan kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal yang berada di desa setempat yang bersumber dari dana APBD II. Pelatihan kepada ibu-ibu Kelompok Wanita Tani ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan kelompok wanita tani dalam mengolah dan memproduksi pangan lokal agar memiliki nilai tambah, memiliki cita rasa dan gizi yang lebih baik. Upaya ini dilakukan agar ketergantungan terhadap beras dan terigu secara bertahap bisa dikurangi.

Tabel. Pelatihan Pangan Lokal Sumber APBD II

Tahun	Lokasi	Komoditas yang diolah
2015	Desa Karangjengkol, Kec.Kutasari	Jagung
	Desa Kejobong, Kec. Kejobong dan Desa Pengadegan, Kec. Pengadega	Singkong
	Desa Siwarak, Kec. Karangreja	Nanas/Tomat
	Desa Penaruban, Kec. Kaligondang	Pisang
2016	Desa Karangjengkol, Kec. Kutasari	Jagung
	Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Singkong
	Desa Siwarak, Kec. Karangreja	Nanas,tomat, pepaya

Untuk olahan jagung Desa Kutasari Kec. Kutasari terpilih sebagai juara 3 tingkat Nasional.

Di samping pelatihan olahan pangan lokal dengan sumber dana dari APBD II juga ada kegiatan olahan pangan lokal dengan dana APBD I di 3 desa yaitu :

Tabel Pelatihan Pangan Lokal Dana APBD I

Tahun	Jenis pelatihan	Lokasi
2014	Pelatihan pembuatan nasi jagung instan	Desa Nangkod, Kec. Kejobong
2015	Pelatihan pembuatan tepung moca	Desa Tetel, Kec. Pengadegan
2016	Pembuatan pangan alternatif bahan dasar sngkong, rengginang dan inthil	Desa Karangpule, Kec. Padamara

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan kelompok wanita tani, juga dilakukan program Optimalisasi Lahan Pekarangan atau program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan pemberian bantuan bibit dari kebun bibit yang dimiliki oleh kelompok wanita tani kepada seluruh anggotanya dalam rangka mengoptimalkan fungsi pekarangan dengan budidaya sayuran, buah, peternakan dan perikanan. Jumlah kelompok wanita tani yang pernah mendapat bantuan dana APBN dalam pengelolaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 76 kelompok, namun yang masih aktif hingga sekarang hanya 21 kelompok. Hasil lomba pengelolaan KRPL tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dimenangkan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Wanita Mandiri, Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari dan beberapa kabupaten/kota pernah berkunjung ke KWT tersebut.

Dalam upaya peningkatan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT) telah diperoleh sertifikasi Prima 3 sebagai bukti pangan segar tersebut aman untuk dimakan. Sertifikasi Prima 3 bukan pangan organik murni tetapi masih mentolerir penggunaan pupuk anorganik dan pestisida dimana penggunaannya masih di bawah

ambang batas maksimal yang diperkenankan. Tahun 2016 sertifikasi prima 3 diberikan untuk 3 komoditas yaitu (1) duku asal desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang (2) nanas dari Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja dan (3) strawberry dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Di tahun-tahun mendatang sejumlah komoditas akan diusulkan antara lain labu madu dari kecamatan Bobotsari, beras sehat dari Kecamatan Kaligondang dan manggis dari Kecamatan Kertanegara. Di samping sertifikasi pangan segar asal tumbuhan juga dilakukan pengambilan sampel jajan di pasar dan beberapa jenis makanan yang diduga mengandung bahan tambahan pangan yang tidak diperkenankan antara lain rhodamin, methyl yellow, borak dan formalin. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan ini tercermin pada skor pola pangan harapan (PPH), dimana pada tahun 2015 adalah 84,33 dan tahun 2016 sebesar 83,3 yang didasarkan pada Data Susenas (Survey Sosial dan Ekonomi Nasional). Capaian untuk konsumsi padi-padian, buah dan sayuran, minyak dan lemak sudah mencapai target angka kecukupan energi (AKE) adapun untuk konsumsi umbi-umbian baru mencapai poin 0,9 dari target 2,5, konsumsi pangan hewani juga baru mencapai poin 13,8 dari target 24 dan kacang-kacangan baru mencapai 6,8 dari target 10. Sehingga kebijakan ke depan diarahkan untuk peningkatan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan yang masih kurang. Target PPH dalam RPJMD sampai akhir tahun 2021 adalah 99,5 dirasa masih sangat tinggi dan perlu dilakukan revisi dan disesuaikan dengan pola makan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Purbalingga..

4. Penanganan kerawanan pangan.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Untuk menangani kondisi kerawanan pangan dilaksanakan program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi rawan pangan dan kemiskinan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Adapun yang menjadi desa sasaran program Desa Mandiri Pangan adalah desa dengan tingkat kemiskinan di atas 30 persen. Tujuan Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat dengan melalui pembentukan kelompok afinitas sebagai cikal bakal tumbuhnya kelompok tani.

Pelaksanaan Desa mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 14 Desa yaitu Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari (2006), Desa Nagkasawit Kecamatan Kejobong (2007), Desa metenggeng Kecamatan Bojongsari (2008), Desa Tetel Kecamatan pengadegan (2008), Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja (2010), Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol (2011), Desa Bokol Kecamatan Kemangkon (2012), Desa Langgar, Kecamatan kejobong (2013), Desa Plumutan Kecamatan Kemangkon (2015), Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon (2015), Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan (2016), Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari (2016), Desa Senon Kecamatan Kemangkon (2016) Desa Majatengah

Kecamatan Kemangkon (2016). Desa Majatengah ini selanjutnya terpilih sebagai juara kedua dalam pelaksanaan Program Desa mandiri Pangan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Aktifitas yang menonjol dari Desa Mandiri Pangan di Desa Majatengah adalah kegiatan penhaluran beras dan hasil panen lainnya serta penyediaan sarana produksi pertanian. Dalam upaya peningkatan kemampuan Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah memberikan bantuan paket ternak kambing kepada 12 Desa Mandiri Pangan sejumlah 324 ekor ternak kambing betina dan 36 ekor ternak kambing jantan serta 26 paket kandang komunal. Bantuan dari APBD II kabupaten Purbalingga berupa peralatan pembuatan pupuk cair sebanyak 3 unit untuk 3 kelompok afinitas Desa pengadegan, Desa Majatengah dan Desa Bumisari.

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan bantuan beras dari Gudang Cadangan pangan Kabupaten Purbalingga sebanyak 2.500 kg beras kepada warga yang kurang mampu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . PAKET BANTUAN BERAS DARI GUDANG CADANGAN
PANGAN 2016

No	DESA	JUMLAH PAKET	KILOGRAM
1	Bumisari, Kec. Bojongsari	100	500
2	Kaliori, Kec. Karanganyar	100	500
3	Sanguwatang, Kec.Karangjambu	50	250
4	Purbasari, Kec. Karangjambu	50	250
5	Tlagayasa, Kec. Bobotsari	50	250
6	Karangreja, Kec. Karangreja	50	250
7	Bodaskarangjati, Kec. Rembang	50	250
8	Bantarbarang, Kec. Rembang	50	250
	JUMLAH	500	2.500

3.2 Kinerja Bidang Perikanan

Bidang Perikanan yang sebelumnya masuk dalam SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan visi dan misi Dinas telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target Rencana Strategis SKPD. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pembentukan Kelembagaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga, Nomor 523.1/296 Tahun 2012, dimaksudkan agar ada peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya dilakukan pengukuran Forikan di tingkat kecamatan yang diikuti 18 kecamatan dan 10 desa.
2. Pembentukan Asosiasi Primagaya (Perikanan Maju Purbalingga Jaya) pada tanggal 21 September 2014. Tujuannya adalah sebagai wadah berkumpul, belajar dan bekerjasama dalam bidang perikanan baik bagi perorangan maupun kelompok. Keanggotaan Primagaya berasal dari kelompok pengolah dan pemasar sejumlah 17 kelompok.
3. Sosialisasi dan promosi Gemar makan ikan, dilakukan antara lain dengan kegiatan safari di tingkat SD. Sosialisasi terkait manfaat makan ikan, lomba, dongeng manfaat makan ikan serta makan bersama produk olahan ikan.
4. Pemberian makanan tambahan bagi anak SD dan PAUD, sebagai kegiatan tahunan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan bagi anak SD dan PAUD. Sasarannya adalah murid SD dan PAUD yang diperkirakan jarang makan ikan, yang diharapkan ada peningkatan konsumsi ikan dalam masa pertumbuhannya.
5. Melakukan promosi/penyuluhan peningkatan konsumsi ikan melalui Radio dalam rangka memasyarakatkan konsumsi ikan, membuat

diversifikasi produk olahan ikan serta tata cara pengolahan ikan yang baik.

6. Pelatihan pengolahan produk perikanan tingkat kecamatan. Tujuannya untuk mendorong perkembangan pengolahan hasil perikanan sekaligus dalam rangka memasyarakatkan gemar makan ikan.
7. Lomba inovasi masakan ikan tingkat kabupaten, merupakan agenda tahunan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah makanan berbasis ikan, sehingga tercipta berbagai menu ikan.
8. Pameran dan bazar produk hasil perikanan. Masih terkait dengan upaya promosi gerakan suka makan ikan dengan menampilkan produk-produk makanan olahan ikan.
9. Kegiatan pasar murah produk hasil perikanan yang bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini untuk memasarkan ikan segar dan produk olahan ikan.
10. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Berupa pemberian bantuan peralatan pengolahan dan bangsal pengolahan, fasilitas sarana dan prasarana pemasaran berupa pembangunan pasar ikan, pembangunan cafe iwaq, yang tujuannya adalah dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga.
11. Sosialisasi pelestarian sumber hayati perikanan bagi para nelayan sungai
12. Penebaran ikan di perairan umum dalam rangka restocking ikan agar tetap lestari
13. Koordinasi pelaku usaha perikanan dalam rangka penguatan kelembagaan dan penguatan jaringan informasi bagi pelaku usaha perikanan

14. Kegiatan pelatihan dan magang pelaku usaha perikanan dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, baik pengetahuan sikap dan ketrampilan sehingga mampu meningkatkan usaha budidaya ikan

15. Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan baik untuk pengembangan pembenihan ikan, pembesaran ikan maupun untuk pengembangan ikan hias. Fasilitasi sarpras berupa kolam budidaya, peralatan budidaya ikan, pakan ikan, benih ikan dan sarana produksi ikan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Purbalingga

Hasil evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi outcome program menunjukkan kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2013	2014	2015	2016
A	Program pengembangan Budiaya Perikanan					
1	Produksi ikan kolam	Ton	10.896	7.219	4.872	5.001
2	Produksi ikan sungai	Ton	249,24	243,17	249,50	254
3	Produksi ikan UPR	000 ekor	365.062	305.068	115.442	116.379
B	Program Peningkatan Daya saing produk perikanan					
1	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/tahun	16,6	10,73	8,27	8,73
2	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	3.797	2.961	1.590	1.511
3	Jumlah pasar ikan	Unit	2	4	4	4

Selama 4 tahun terakhir dengan berbagai upaya yang dilaksanakan ternyata tidak berdampak positif terhadap tingkat produksi dan tingkat konsumsi perikanan per kapita, justru mengalami penurunan yang signifikan. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam menggerakkan masyarakat dalam peningkatan produksi dan konsumsi ikan, termasuk dalam mendayagunakan pasar-pasar ikan yang sudah dibangun.

D. Peluang dan tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

4.1 Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan tentang penanganan kemiskinan. Sehingga dibuat sejumlah regulasi yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Perlu dimunculkan program dan kegiatan yang secara langsung berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.
- b. Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat yang masih rendah perlu mengarahkan masyarakat untuk mendayagunakan potensi pangan lokal yang cukup melimpah menjadi sumber pangan kompelemen terhadap pangan pokok beras, sehingga konsumsi beras per kapita bisa dikurangi. Demikian pula dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat dikreasikan berbagai jenis makanan yang sehat menarik dan memiliki nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. Belum termanfaatkannya seluruh potensi sumberdaya pendukung pangan dan perikanan di Kabupaten Purbalingga utamanya lahan dan sumber daya perairan dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perikanan.

- d. Tingginya permintaan bahan pangan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dari berbagai macam komoditas baik untuk keperluan konsumsi maupun kegiatan industri pangan. Demikian pula permintaan terhadap produk perikanan juga sangat tinggi baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;
- e. Adanya dukungan dari pemerintah baik dari sisi regulasi maupun bantuan manajemen serta teknis terhadap kebijakan pengembangan usaha pangan dan usaha perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha skala kecil;
- f. Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi);
- g. Dberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil pangan dan perikanan yang mengedepankan pelayanan; higienitas dan kontinuitas pasokan.
- h. Peluang untuk meningkatkan sumber daya manusia baik melalui diklat, pendampingan, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya bagi petani, pengusaha pangan, petani ikan dan nelayan yang pengetahuan dan ketrampilannya masih rendah agar mampu mengikuti perubahan dan inovasi.

4.2 Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

- a. Tingkat kemiskinan di Purbalingga masih cukup tinggi yakni mencapai 19,7 persen, di antaranya disebabkan oleh angka pengangguran yang masih tinggi, yang berpengaruh terhadap nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah di Kabupaten Purbalingga dan berada di peringkat 27 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- b. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, khususnya lahan yang di samping mengalami degradasi kesuburan lahan, juga alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri serta keperluan lainnya yang begitu cepat sehingga mengancam ketersediaan lahan yang cukup untuk usaha pertanian. Demikian pula di sektor perikanan, terutama terjadinya tekanan pada sumberdaya perikanan tangkap. Kondisi seperti mengharuskan perubahan sistem pertanian dan perikanan yang lebih produktif dan cepat.
- c. Masalah permodalan yang masih kurang dalam menunjang usaha pengolahan pangan dan hasil perikanan yang bersifat modern dan terstandar;
- d. Tingginya harga pakan ikan dari pabrikan sehingga berpengaruh pada pendapatan pembudidaya ikan
- e. Globalisasi (*free trade*) mengancam eksistensi industri Perikanan Purbalingga;
- f. Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan;
- g. Minat masyarakat untuk budidaya perikanan mengalami penurunan sehingga dibutuhkan upaya yang mampu meningkatkan gairah bagi pembudidaya ikan untuk memproduksi secara optimal dan menguntungkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Purbalingga. Sumber daya yang tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun kedepan 2016 - 2021 dijumpai sejumlah permasalahan yang dihadapi dan perlu ditemukan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Identifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan :
 - a. Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan dan perikanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan dan perikanan :

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
- c. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
- d. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketahanan pangan dan perikanan.
- e. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

(3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan :

- a. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya.
- c. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi untuk perbaikan perumusan dan pelaksanaan di masa depan.

(4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Berkurangnya lahan pertanian akan berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian sebagai bahan pangan, dan mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan optimalisasi potensi lahan dalam rangka menjaga tingkat produksi pertanian dan perikanan.

- (5) Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat masih tinggi, upaya untuk melakukan substitusi bahan pangan lokal sumber karbohidrat terhadap sebagian konsumsi beras masih belum optimal. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang dicerminkan dengan masih tingginya rumah tangga yang masuk dalam daftar penerima beras miskin/beras sejahtera dari pemerintah.
- (6) Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
- (7) Optimalisasi lahan pekarangan dan program kawasan rumah pangan lestari belum membudaya, sehingga bagi kelompok yang sudah pernah menerima paket kegiatan OPP/KRPL tidak secara otomatis melanjutkan kegiatan sebagai suatu keharusan.
- (8) Produksi perikanan masih rendah, yang disebabkan oleh rendahnya produktifitas lahan budidaya perikanan, belum dilakukan intensifikasi secara optimal. Rendahnya produk perikanan juga karena komponen pangan menempati urutan pertama dalam biaya produksi dan pembudidaya ikan masih mengandalkan pada pakan ikan pabrikan yang harganya cenderung selalu naik.
- (9) Konsumsi ikan cenderung menurun periode tahun 2013 sampai periode 2015 disebabkan karena berkurangnya produksi ikan akibat dari alih fungsi luas lahan budidaya ikan yang awalnya 202 ha menjadi 112,5 ha pada tahun 2014. Meskipun setiap tahun dilaksanakan program gemar makan ikan, namun konsumsi ikan semakin rendah yakni 8,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2013 yang

mencapai 16 kg/kapita/tahun, masih jauh dari capaian konsumsi tingkat nasional yang telah mencapai 42 kg/kapita/tahun dan konsumsi Jawa Tengah yang telah mencapai 22 kg/kapita/tahun.

- (10) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan
- (11) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan
- (12) Permodalan pelaku usaha perikanan relative sedikit sehingga pengembangan usahanya belum optimal.

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan tentang gambaran masa depan yang lebih baik, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Purbalingga adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA".

Adapun pernyataan 7 (tujuh) misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
2. Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah swt serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inverstasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, social dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ke 7 misi tersebut, misi ke 3 dan misi ke 5 sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pada misi ke 3 (tiga) terkait dengan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia utamanya adalah pangan. Pangan menjadi kebutuhan asasi masyarakat yang ketersediaanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah melalui peran semua OPD yang terkait dengan ketersediaan, distribusi dan pemasaran komoditas pangan utamanya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melakukan koordinasi antara sektor pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, baik dari segi ketersediaan pangan maupun kemudahan akses pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Di samping upaya mencukupi ketersediaan dan distribusi pangan secara baik, juga terkait dengan upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk menghasilkan masyarakat yang sehat dan terpenuhinya semua unsur gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Terkait dengan keamanan pangan, pemerintah berupaya untuk mengawasi dan mencegah penggunaan bahan pangan/bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Regulasi terkait dengan keamanan pangan harus segera disiapkan.

Adapun misi ke 5 terkait dengan pengembangan industri pengolahan pangan bagi masyarakat, peningkatan optimalisasi lahan pekarangan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri, meningkatkan peran ekonomi LUPM (:Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) sekaiigus mendukung kestabilan harga pangan strategis serta pembangunan sektor perikanan dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat melalui pengembangan perikanan budidaya, pelayanan perizinan usaha perikanan, restocking perikanan di perairan umum untuk menjaga kelestarian ekosisten sungai yang kemudian sebagaimana dijadikan mata pencaharian masyarakat dalam upaya meningkatkan produksi ikan tangkap di perairan sungai secara bertanggung jawab.

C. Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1 Telaahan renstra Badan Ketahanan Pangan pada Kementerian Pertanian RI

Pembangunan Ketahanan Pangan Periode 2015 – 2019 lingkup Badan Ketahanan Pangan didasarkan pada visi ‘Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan’. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi, yaitu :

- a) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
- b) Mementapkan penangnaan kerawanan pangan
- c) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok
- d) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- e) Muwujudkan keamanan pangan segar.

Badan Ketahanan Pangan memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu :

- a. Pengembangan ketersediaan pangan dan penangnaan kerawanan pangan.
- b. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.
- c. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
- d. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pematapan secara terpadu dan terkoordinir, yaitu :

- a) Pengembangan Desa mandiri Pangan di daerah miskin dan rawan pangan.
- b) Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis.
- c) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan
- d) Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah.
- e) Diversifikasi pangan
- f) Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen melalui Toko Tani Indonesia

Program startegis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015 -2019 yang akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 513 Kabupaten/Kota antara lain :

- a) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
- b) Peningkatan pengawasan pangan segar
- c) Toko Tani Indonesia (TTI)
- d) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- e) Penguatan kapasitas cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
- f) Penguatan kapasitas produksi masyarakat melalui kawasan mandiri pangan dan
- g) Penanganan kerawanan pangan kronis dan transien

Adapun capaian beberapa indikator utama Badan Ketahanan Pangan kementerian Pertanian menunjukkan perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam periode 2010 – 2014 yang ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH berfluktuasi setiap tahunnya.

Perkembangan Konsumsi Energi, Protein dan Skor PPH 2010 – 2014

Tingkat Nasional

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.025	2.048	1.944	1.930	1.949
Konsumsi protein (gr/kap/hari)	57,9	59,1	55,9	55,7	56,6
Skor Pola Pangan Harapan	85,7	85,6	83,5	81,4	83,4

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Menunjuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya diubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah, disebutkan visinya adalah “ MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN JAWA TENGAH”

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) buah misi yaitu :

(1) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

(2) Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaagaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kerifan lokal.

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 dengan mendasarkan pada misi (2), Tujuannya adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.

2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggapi kerawanan pangan.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Sasarannya adalah :

1. Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
2. Tercapainya ketersediaan pangan utama
3. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah
5. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Tujuan dari Misi (3) adalah :

1. Meningkatkan penganeekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Sasaran misi (3) adalah :

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat
2. Tercapainya pembinaan dan pengawasa pangan.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana nterimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1)meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2)meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.45/PERMENKP/2015, sebagai berikut:

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh **stakeholders** kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah, bahwa penjabaran tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan kualitas database sektor kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

6. Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan
7. Meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
8. Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan serta ekspor produk perikanan
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penyuluh perikanan
10. Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan pembudidaya dan pengolah/pemasar ikan
11. Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
12. Meningkatkan peran masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
13. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Strategi

1. Pengembangan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang diminati pasar dengan meningkatnya mutu ikan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
2. Pengembangan dan pemasyarakatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mendekatkan kepada daerah penangkapan ikan dengan pembuatan rumah/apartemen ikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap

3. Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran yang masih tradisional dalam hal mutu produk sesuai dengan sistem jaminan mutu keamanan pangan guna pemenuhan kebutuhan dalam dan luar negeri, dengan tetap membina usaha pengolahan dan pemasaran modern
4. Pencegahan konflik antar nelayan dan meningkatnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan dan pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, menumbuhkan kelompok-kelompok baru serta membantu sarana kelengkapan operasionalnya, dengan tetap melakukan pembinaan dan operasi pengawasan bersama aparat terkait
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah

Kebijakan

1. Pembangunan perikanan budidaya, melalui:
 - a. pengembangan kawasan perikanan yang sudah ada
 - b. penetapan/pencanangan kawasan perikanan baru dengan mendorong Kabupaten./Kota memiliki dokumen perencanaan (masterplan dan DED) kawasan budidaya ikan
2. Pengembangan produk benih dan induk berkualitas unggul melalui:
 - a. pengembangan *Broodstock Center* di BBIAT (Balai Budidaya Ikan Air Tawar)
 - b. pemenuhan jaminan mutu dan keamanan benih dan induk ikan
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
 - a. optimasi dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan
 - b. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

- c. peningkatan produktivitas budidaya : *demfarm* udang vanamei, penerapan teknologi *biofloc*
 - d. pengembangan Minapadi dan UGADI (Udang Galah dengan Padi)
 - e. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku local
4. Peningkatan produksi perikanan tangkap, melalui
- a. peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
 - c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara lain melalui: pemberian alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan kecil (GPS, *Fish Finder*, dan *solar cell*), pembuatan rumah /apartemen ikan, bantuan mesintempel, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, peralatan perbengkelan, dan cool box
5. Penerbitan Kartu (BBM) Nelayan dan peningkatan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan instansi terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, Ditjen KP3K KKP RI, PERTAMINA, P.T Aneka Kimia Raya, dan HNSI)

D. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. RTRW menjadi

pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga adalah : “ Mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga berbasis agropolitan didukung pariwisata dan industri berkelanjutan “.

Tujuan di atas mengandung makna bahwa penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun (2011-2031) yang akan datang ditujukan untuk membentuk kondisi sebagai berikut:

a. Purbalingga Agropolitan

Purbalingga yang tumbuh berbasis ekonomi pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.

b. Pengembangan Pariwisata dan Industri

Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pengembangan pariwisata dan industri diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter

generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten di sekitarnya (inter region).

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura serta wilayah budidaya perikanan. Pada kawasan lahan pertanian diuraikan tentang lahan basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi maupun lahan tadah hujan. Kawasan peruntukan lahan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

Untuk pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 25.207 hektar, terdiri dari lahan basah 16.030 hektar dan lahan kering 9.177 hektar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Lahan Basah (ha)	Lahan Kering (ha)	Total (ha)
1	Bobotsari	910	527	1.437
2	Bojongsari	1.086	266	1.352
3	Bukateja	1.740	851	2.591
4	Kaligondang	868	864	1.732
5	Kalimanah	679	635	1.314
6	Karanganyar	268	1.271	1.539
7	Karangjambu	319	475	794
8	Karangmoncol	1.235	674	1.909
9	Karangreja	85	117	202
10	Kejobong	382	93	474
11	Kemangkong	1.938	945	2.883
12	Kertanegara	1.122	92	1.215

13	Kutasari	1.025	139	1.164
14	Mrebet	1.997	35	2.032
15	Padamara	720	514	1.233
16	Pengadegan	55	89	154
17	Purbalingga	259	455	714
18	Rembang	832	1.634	2.468

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud di atas seluas kurang lebih 22.616 hektar yang ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Pertanian hortikultura kurang lebih 172.887 hektar.

Adapun kawasan perikanan terdiri dari kawasan budidaya perikanan darat dan kawasan pengolahan ikan. Untuk kawasan perikanan darat (air tawar) seluas kurang lebih 112,5 hektar yang meliputi kawasan pembenihan di Kutasari, kawasan pembesaran di Kalimanah, Mrebet, Bojongsari dan Padamara, kawasan pemasaran di Kecamatan Purbalingga dan Kutasari serta kawasan produksi perikanan di Kecamatan Purbalingga dan Kutasari. Adapun untuk kawasan pengolahan ikan berada di Kecamatan Purbalingga.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati Purbalingga, telaahan terhadap renstra kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga dan Kajian Lingkungan Hidup strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Perkembangan penduduk yang sangat cepat membutuhkan penambahan areal permukiman dari tahun ke tahun. Hal ini akan berdampak pada pengurangan lahan pertanian yang pada akhirnya akan

menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan yang mengandalkan pada sumberdaya lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang subur saat ini belum disertai dengan upaya pencetakan lahan baru yang potensial untuk memproduksi komoditas pertanian. Regulasi terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan juga belum memenuhi harapan. Ini merupakan hal yang serius bahwa pemerintah harus melakukan pengendalian yang ketat dengan tidak membiarkan lahan pertanian dalam rangka mendukung pasokan pangan tanpa perencanaan dan pertimbangan dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian.

2. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang memperesentasikan asupan pangan sumber karbohidrat yang belum beragam, kurangnya konsumsi pangan sumber protein hewani, kurangnya asupan sayur-sayuran dan buah-buahan, diperparah lagi dengan gaya hidup moderen dengan hidangan siap saji yang umumnya hanya mengandalkan karbohidrat dan protein hewani dengan mengabaikan konsumsi sayur-sayuran, buah dan kacang-kacangan. Hal ini akan mengakibatkan konsumsi pangan yang tidak beragam, bergizi, seimbang dan aman. Masyarakat perlu diarahkan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat dan beragam, tidak mengkonsumsi tambahan pangan berbahaya dengan mengoptimalkan pangan lokal yang cukup beragam. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman, serta meningkatkan diversifikasi pangan bagi masyarakat agar tercipta skor pola pangan harapan yang ideal.

3. Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi yang diakibatkan oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi, keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lahan, serta semakin buruknya kualitas lahan pertanian berakibat pada kurangnya produksi komoditas pangan, sehingga ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan pihak lain masih sangat tinggi. Belum lagi keterbatasan akses infrastruktur di kawasan perdesaan menjadi salah satu penyebab akses pangan masyarakat menjadi terkendala. Meningkatkan konsumsi pangan hewani khususnya konsumsi ikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini perlu intervensi dari pemerintah dalam pemberian bantuan pangan pokok untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, melakukan perbaikan di sektor pertanian, melakukan perbaikan infrastruktur di tingkat pedesaan, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif, serta menggiatkan sosialisasi untuk memanfaatkan bahan pangan potensi lokal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
4. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan.
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum semua wilayah mempunyai infrastruktur dasar yang memadai sehingga menjadi kendala pasokan dari produsen ke konsumen. Jika proses distribusi sering terkendala, maka akan menyebabkan kenaikan harga pangan dan kerusakan bahan pangan segar. Apalagi jika terjadi bencana yang berakibat rusaknya infrastruktur, akan berakibat terputusnya rantai pasokan dan akan berdampak pada kenaikan harga.
5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar.

Pangan yang bergizi, berimbang tetapi tidak aman untuk dikonsumsi menjadi pangan yang tidak berharga. Karena pangan yang tidak aman akan mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan konsumen. Kegiatan operasi pasar dan swalayan yang sering dilakukan, ternyata masih sering mendapati pangan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya antara lain rhodamin, methyl yellow, formalin dan boraks. Upaya sosialisasi dan peringatan terus dilakukan untuk menyadarkan pada masyarakat baik kepada produsen maupun konsumen untuk tidak memperlakukan pangan sehat menjadi pangan yang tercemar baik cemaran biologis, kimia maupun fisik yang akan sangat merugikan kesehatan manusia. Untuk meningkatkan upaya pengawasan dan tindakan tegas maka perlu dikeluarkan peraturan daerah tentang keamanan pangan dan larangan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya.

6. Produksi dan produktivitas ikan serta tingkat konsumsi masih rendah, hal ini diakibatkan oleh banyak faktor antara lain ketersediaan dan kualitas air yang harus memadai untuk budidaya, biaya produksi khususnya kebutuhan pakan ikan yang cukup tinggi, dan kurangnya benih/bibit unggul dan persaingan yang tidak sehat. Di samping itu kegiatan usaha budidaya perikanan masih menjadi kegiatan usaha sampingan belum menjadi kegiatan usaha pokok. Perlu dilakukan perbaikan manajemen pemeliharaan ikan yang tepat antara lain peningkatan kompetensi teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Pemberian Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) sehingga biaya produksi yang dikeluarkan akan diimbangi hasil produksi yang memadai dan menguntungkan. Di lain pihak konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga

juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita/tahun di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Perlu dilakukan kampanye, sosialisasi tentang keunggulan dan nilai gizi ikan, melakukan kegiatan pengolahan ikan agar mempunyai cita rasa dan kandungan gizi yang baik. Serta membiasakan untuk mengkonsumsi ikan yang cukup untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat.

7. Produksi perikanan tangkap sungai terus menurun seiring kerusakan ekosistem sungai akibat aktifitas galian, pencemaran, bencana alam dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan
8. Kapasitas produksi benih berkualitas unggul belum sebanding dengan kebutuhan;
9. Peningkatan perbaikan penyediaan dan cakupan data ketahanan pangan dan perikanan yang memadai dan terbarukan dalam rangka perbaikan perencanaan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

4.1.1 Visi

Visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan. Visi pembangunan ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Purbalingga yang mengacu kepada visi Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan target serta pencapaian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“.

Selanjutnya, Misi OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah menjabarkan dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kompetensinya.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut maka ditentukan 3 misi dari 7 misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah yaitu:

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran
2	Meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan	Tercukupinya kebutuhan pangan bagi masyarakat
3	Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
4	Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah
5	Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
6	Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan
7	Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan
8	Meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan	Meningkatnya produksi pangan kearifan lokal dan pengolahan
9	Meningkatkan kapasitas	Meningkatnya kapasitas

	sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan perikanan	sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan perikanan
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan	Meningkatnya produksi ikan
11	Meningkatkan Daya Saing produk perikanan	Meningkatnya daya saing produk perikanan
12	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan perikanan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk itu dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

No	Strategi	Kebijakan
1	Peningkatan sarana dan rasarana kantor	Peningkatan sarana dan prasarana kantor
2	Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur
4	Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup	Peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat
5	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan cadangan pangan pemerintah. • Pengembangan lumbung pangan masyarakat. • Peningkatan fungsi kelembagaan petani

6	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Peberdayaan masyarakat desa melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM).
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pangan masyarakat dan pemantauan harga pangan strategis.
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemasaran dan kewirausahaan petani
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa	Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.
8	Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan perikanan melalui pendidikan kemsarakatan	Pendidikan kemasyarakatan
9	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi B2SA
		<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
10	Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan pangan segar, produk makanan olahan kepada pelaku usaha bidang pangan dan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan mutu dan keamanan pangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sertifikasi dan pengawasan pada keamanan pangan segar
11	Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sertifikasi CPIB, CBIB dan CPPIB • Fasilitasi PUMP Perikanan Budidaya

		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ikan • Pengawasan Penggunaan dan Peredaran pakan dan Obat Ikan • Pengembangan Kaji Terap Teknologi perikanan • Pengembangan Komoditas unggulan perikanan • Operasional UPTD BIAT
12	Memperkuat kemandirian pelaku usaha perikanan dan daya saing produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan pelaku usaha perikanan • Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok • Pelatihan dan Magang Pelaku usaha Perikanan • Promosi dan gerakan memasyarakatkan makan ikan
13	Meningkatkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penangkapan ikan di perairan umum secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. • Pengendalian dan Pemeliharaan Sumber Hayati Perikanan (SHP) Perairan Umum • Pembinaan dan Pengembangan Teknis Manajemen Usaha Perikanan Tangkap • Fasilitasi Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUPI)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai target kinerja Dians Ketahanan Pangan dan Perikanan ditempuh dengan beberapa program yaitu :

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
5. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
6. Program Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan

Setiap program direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penguatan Kelembagaan Daerah

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Kantor
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD

II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Fasilitasi Raskin
2. Fasilitasi Cadangan dan Distribusi Pangan
3. Operasi Gudang Cadangan Pangan
4. Penyusunan Skor Pola Pangan harapan dan Analisis Ketahanan Pangan

5. Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBH-CHT)
6. Pembinaan Kewaspadaan dan Keamanan Pangan
7. Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
8. Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan

III. Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

1. Fasilitasi Desa Mandiri Pangan
2. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat

IV. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

1. Pembangunan/ Rehabilitasi sarana prasarana fisik Kawasan peikanan budidaya (DAK)
2. Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pemberian Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
3. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ikan dan Pengawasan Peredaran Obat Ikan
4. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kaji Terap Teknologi perikanan
5. Operasional UPTD BIAT
6. Fasilitasi Bantuan Sarana produksi Perikanan

V. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

1. Pelatihan dan Magang Pelaku Usaha Perikanan
2. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan serta fasilitasi kemitraan pelaku usha perikanan
3. Promosi dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

VI. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

1. Pengendalian dan Pemeliharaan Sumber Hayati Perikanan (SHP)
Perairan Umum.
2. Pembinaan dan Pengembangan Teknis Manajemen Usaha Perikanan
Tangkap
3. Pengembangan Statistik Perikanan
4. Fasilitasi Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUPI)

Indikator Bidang Ketahanan Pangan mencakup :

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Indikator Kegiatan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	% ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis terhadap kebutuhan per tahun
1	Fasilitasi rastra	Jumlah KPM Rastra
2	Fasilitasi penganeekaragaman konsumsi pangan	Konsumsi energi/kapita/hari (kkal)
3	Fasilitasi pemanfaatan pekarangan	Konsumsi protein/kapita/hari (gram)
4	Fasilitasi usaha pengolahan bahan pangan potensi lokal	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)
5	Fasilitasi cadangan dan distribusi pangan	Ketersediaan energi/kapita/hari (kkal)
		Ketersediaan protein/kapita/hari (gram)
		PPH Ketersediaan (skor)
		Neraca Bahan Makanan (surplus/munus)
6	Pembinaan kewaspadaan dan keamanan pangan	Persentase pangan aman (persen sampel tercemar terhadap keseluruhan sampel)
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

		(jumlah kelompok)
7	Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)
8	Operasional gudang cadangan pangan	Jumlah gudang cadangan pangan (unit)
9	Pengadaan sarana dan prasarana lumbung desa	Pengembangan lumbung pangan masyarakat (unit)
10	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah kegiatan koordinasi (kali)
11	Fasilitasi desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan (desa)
		Jumlah kampung mapan (kampung)
12	Fasilitasi pemanfaatan pekarangan	Jumlah KWT pekarangan yang difasilitasi
		Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (unit/kelompok)
		Jumlah Lembaga usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (kelompok)
13	Peningkatan akses pangan masyarakat	Jumlah KPM penerima beras Purbalingga (KPM)

Indikator Bidang Perikanan mencakup :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Ikan konsumsi <ul style="list-style-type: none"> • Benih ikan • Ikan hias
a. Pembangunan/ Rehabilitasi sarana prasarana fisik Kawasan peikanan budidaya (DAK)	Luas lahan budidaya
b. Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pemberian Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)	Jumlah unit usaha yang CPIB, CBIB dan CPPIB
c. Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Perikanan	Jumlah kelompok Penerima Bansarpras
d. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ikan dan	Jumlah Pengambilan Sampel produk

Pengawasan Peredaran Obat Ikan	Perikanan Budidaya
e. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kaji Terap Teknologi perikanan	Jumlah dan jenis pakan dan obat yang terjamin mutu dan keamanannya
	Jumlah Kaji Terap (kegiatan)
	Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan
f. Operasional UPTD BIAT	Jumlah benih Ikan (ekor)
2. PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha yang diberdayakan
	Angka Konsumsi Ikan
a. Pelatihan dan Magang Pelaku usaha Perikanan	Jumlah Pelaku usaha yang dilatih
	Jumlah pelatihan yang dilakukan
b. Pembinaan kelembagaan kelompok perikanan serta fasilitasi kemitraan pelaku usaha perikanan	Jumlah Kelompok yang dibina
	Jumlah temu kemitraan
c. Kegiatan Promosi dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah kegiatan promosi perikanan
	Jumlah kegiatan GEMARIKAN
3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	Produksi ikan tangkap
	Jumlah Ijin Usaha Perikanan yang diterbitkan
a. Pengendalian dan Pemeliharaan Sumber Hayati Perikanan (SHP) Perairan Umum	Jumlah lokasi restocking
b. Pembinaan dan Pengembangan Teknis Manajemen Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina
c. Pengembangan Statistik Perikanan	Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan
d. Fasilitasi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Jumlah TPUPI yang diterbitkan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan kinerja pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan. PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi dan keamanan serta kehalalan. Pola konsumsi pangan mengarahkan masyarakat agar meningkatkan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam, dengan gizi seimbang mencakup kecukupan energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya setempat. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah angka kecukupan gizi (AKG) rata-rata per kapita perhari untuk energi adalah 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram. Sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah dengan skor PPH. Skor PPH sebanyak 100 sebagai pola pangan yang sangat ideal.

Susunan keragaman pangan yang diukur dalam skor Pola Pangan Harapan dalam kategori ideal (skor 100) adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	275	1.000	50	0,5	25
2	Umbi-umbian	100	120	6	0,5	2,5
3	Pangan hewani	150	240	12	2,0	24
4	Minyak dan Lemak	20	200	10	0,5	5,0
5	Buah/biji berminyak	10	60	3	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	35	100	5	2,0	10,0
7	Gula	30	100	5	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	250	120	6	5,0	30,0
9	Lain-lain	-	60	3	0,0	0,0
	Jumlah		2.000	100		100

Adapun target untuk capaian skor PPH Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

No	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)					
	Kinerja Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021
RPJMD	86,86	89,39	91,92	94,45	96,98	99,05
RENSTRA DKPP	83,34	85,21	85,82	86,22	86,76	87,64

2. Ketersediaan Pangan Utama. Ketersediaan pangan utama (pokok) adalah ketersediaan beras bagi masyarakat yang dihitung dari beras yang dicadangkan dibandingkan dengan beras yang dikonsumsi masyarakat per hari. Ketersediaan pangan utama ini sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian khususnya dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri/daerah sendiri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan.

Target ketersediaan pangan utama dalam kurun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (Kg/Kap/Tahun)					
	Kinerja awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021
RPJMD	164,5	166	168	170	173	175
RENSTRA DKPP	164,5	166	168	170	173	175

3. Produksi Ikan. Produksi ikan meliputi jumlah produksi ikan konsumsi, jumlah produksi benih ikan dan jumlah produksi ikan hias.

Adapun target produksi ikan konsumsi (tidak termasuk produksi benih dan ikan hias) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

No	PRODUKSI IKAN KONSUMSI (TON)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RPJMD	4.943	5.013	5.083	5.153	5.223	5.293
RENSTRA DKPP	4.943	5.013	5.083	5.153	5.223	5.293

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Resntra DKPP disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini kiranya dapat mendukung Visi “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Perikanan juga merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat ditinjau ulang (review), jika target kinerja sudah terlampaui.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. SEDIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610328 198603 1 005